

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di setiap negara khususnya Indonesia, pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini masalah pembiayaan menjadi sangat vital dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut. Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan pun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, maka dari itu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber dana berupa pajak. Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang cukup krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pemerintah untuk

memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perusahaan biasanya melakukan berbagai cara dan strategi untuk dapat mengurangi dan mengefisienkan beban pajaknya, yang dianggap sebagai biaya. Dengan adanya usaha-usaha dan strategi tersebut, diharapkan pajak terutang dapat diminimalisir sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang optimal. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam bentuk agresivitas pajak.

Menurut Frank et al (2006) dalam Lanis dan Richardson (2013) bahwa : “Agresivitas pajak sebagai tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*)”. Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melaksanakan strateginya dalam melakukan agresivitas pajak salah satunya yaitu likuiditas. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan (Krisnata, 2012). Perusahaan yang

memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid. Masalah likuiditas merupakan salah satu masalah penting dalam suatu perusahaan yang relatif sulit dipecahkan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu manajemen laba. Menurut Scoot (2009) manajemen laba adalah tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi. Manajemen laba merupakan tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political cost. Manajemen laba juga merupakan bentuk *efficient contracting*, dimana manajemen laba memberikan kepada manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan-perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan manajemen laba perusahaan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil.

Selain faktor-faktor diatas agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugiannya (Pemerintah UK, 2004, hal. 3, dalam Lanis dan Richardson, 2012). Perusahaan yang terbukti melakukan

penghindaran pajak mengakibatkan perusahaan tersebut akan kehilangan legitimasinya di mata stakeholder. Pajak dan CSR memiliki kemiripan dalam hal keduanya memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum (Yoehana, 2013).

Industri manufaktur berpengaruh sangat besar dalam kehidupan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Di antara sektor-sektor yang terdaftar di sektor manufaktur, sektor otomotif dan komponen diyakini pertumbuhannya akan terus meningkat dan akan menjadi andalan ekspor Indonesia. Menteri Perdagangan mengatakan dalam lima tahun ke depan industri otomotif akan menjadi penyumbang ke tiga terbesar setelah kelapa sawit dan alas kaki. Beliau memperkirakan dalam lima tahun ke depan ekspor otomotif yang tumbuh menjadi 11 miliar dollar AS (www.antaranews.com).

Berikut fenomena Agresivitas Pajak yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu:

Fenomena pertama mengenai kasus penghindaran pajak pada sektor otomotif di Indonesia. Di tahun 2013 terjadi penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN dalam laporan pajaknya menyatakan nilai penjualan mencapai Rp. 32,9 triliun, namun Direktorat Jenderal Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp. 34,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp. 1.5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp. 500 miliar. Sebelum 2003 Perakitan

mobil (manufacturing) masih digabung dengan bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Karena pemisahan ini, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun, setelah dipisah gross margin TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di 8 TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung dengan TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. “Kemana larinya 7%?” begitu Tanya Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili Direktorat Jendral Pajak di Pengadilan Pajak. (Sumber: www.nasional.kontan.co.id). Kasus lain adalah seperti dikatakan oleh Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara, bahwa hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama 7 (tujuh) tahun (Sumber: www.merdeka.com).

Selain fenomena di atas, fenomena mengenai penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk

menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. 6 Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (capital expenditure/capex) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. (<http://investor.id>).

Fenomena penghindaran pajak yang terakhir terjadi pada Suzuki Motor Corp pada tahun 2016. Suzuki Motor Corp baru-baru ini melakukan kasus penggelapan pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor mereka untuk menyembunyikan dana sebesar Rp 38,6 miliar untuk menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Dalam kasus tersebut melaporkan bahwa Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan barang gudang. 7 Perlu diketahui bahwa suku cadang belum terpakai dikategorikan barang gudang dan tidak bisa dihitung biaya kecuali telah digunakan atau dibuang. Atas kasus ini Suzuki dituntut membayar Rp 57,9 miliar untuk menebus pajak yang mereka bohongi beserta denda atas

kesalahan yang mereka perbuat. Kasus ini seakan mencoreng muka Suzuki untuk kedua kalinya apabila mengingat dosa lama Suzuki pada bulan Mei lalu dimana mereka sengaja menggunakan metode tes konsumsi BBM yang tidak sesuai agar produknya terlihat lebih irit BBM dibandingkan pabrikan lain. (<http://autonetmagz.com>).

Dari beberapa fenomena di atas, terbukti bahwa tindakan penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi juga bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan CSR yang diteliti oleh I Dewa Ayu Intan Pradnyadari dan Abdulrahman (2015), Winarti Monita Sagala dan Dwi Ratmono (2015), Fitri Anita M, Yesi Mulia Basri, dan Julita (2015), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Erlang Purwanggono dan Abdulrahman (2015), Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan (2015), Dea Listikasari, Edfan Darlis, dan Melida (2017).
2. *Leverage* diteliti oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Fitri Anita M, Yesi Mulia Basri, dan Julita (2015), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya

(2015), Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebecca (2016), Agus Purwanto, Yusraini, dan Susilatri (2016).

3. Likuiditas diteliti oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Lucy Tania Yolanda Putri (2014), Fitri Anita M, Yesi Mulia Basri, dan Julita (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Fitri Sukmawati dan Cyntia Rebecca (2016), Agus Purwanto, Yusraini, dan Susilatri (2016).
4. Manajemen laba diteliti oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Lucy Tania Yolanda Putri (2014), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Agus Purwanto, Yusraini, dan Susilatri (2016).
5. Ukuran Perusahaan diteliti oleh Fitri Anita M, Yesi Mulia Basri, dan Julita (2015), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015).
6. Profitabilitas diteliti oleh Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan (2015).

Penelitian ini merupakan replikasi dari Lucy Tania Yolanda Putri (2014) yang meneliti tentang “Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2008-2012 (4 tahun penelitian). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lucy Tania Yolanda Putri (2014) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sehingga manajemen laba yang dilakukan perusahaan manufaktur bukan dengan motivasi pajak atau untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Corporate Governance berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Perusahaan otomotif dan komponen dipilih karena industri otomotif merupakan salah satu industri yang prospektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi pada nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan industri otomotif nasional yang dirangsang oleh kebijakan Pemerintah yang mengatur sektor ini, serta kemajuan teknologi dan kondisi ekonomi yang berlaku (warta Ekspor, 2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan sub-sektor otomotif dan komponen yaitu, karena perusahaan otomotif dari tahun ke tahun mengalami perkembangan

yang baik dan banyaknya produsen otomotif-otomotif mancanegara yang berminat untuk menanam modalnya di tanah air. Hal ini salah satu bukti pesatnya perkembangan dunia otomotif nusantara adalah masuknya mobil-mobil dengan teknologi yang canggih.

Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel tempat dan sampling dalam penelitian-penelitian terdahulu maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul **“PENGARUH LIKUIDITAS, MANAJEMEN LABA, DAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyaknya perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang menghindari pembayaran pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak.
2. Perusahaan menghindari pajak, karena pajak yang dinilai sangat besar dan merugikan perusahaan tersebut.

3. Target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi akibat penghindaran pajak dari perusahaan tinggi.
4. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik serta untuk mengurangi penerimaan negara.
5. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, akan diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terperinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana likuiditas pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
2. Bagaimana manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.

3. Bagaimana Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
4. Bagaimana agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
5. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
6. Seberapa besar pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
7. Seberapa besar pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh likuiditas, manajemen laba, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis likuiditas pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
2. Untuk menganalisis manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
3. Untuk menganalisis *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
4. Untuk menganalisis agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, yaitu :

A. Kegunaan Teori

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan baru mengenai seberapa besar pengaruh likuiditas, manajemen laba, dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018.

B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh likuiditas, manajemen laba, dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan agresivitas pajak agar hal tersebut tidak dilakukan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak.

1.5 Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa efek Indonesia yaitu www.idx.co.id sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.